

PENGARUH Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan

(Tinjauan Filsafat Sosial)

Oleh: Dwi Siswanto¹

Abstract

Relevance between world view of Javanese and adopted model of leadership is reflected in their moral rules that emphasizes attitudes, such as patient (narima), introspection (waspada-eling), humble (andap asor and prasaja) which is applied by each individual in realizing harmony of their society. Java's leadership model is paternalism and charismatic. They are respectful and obedient to their leader because of his/her charisma rather than a compulsion.

Keywords: Javanism/ Javanese way of life, leadership, narima, waspada-eling, andap asor, prasaja, paternalism.

A. Pendahuluan

Masyarakat Jawa merupakan salah satu bentuk sosieta manusia Indonesia yang tergolong dalam kelompok budaya. Masyarakat Jawa sebagai kelompok budaya (Jawa) ditandai dengan adanya kesamaan identitas yang khas jika dibandingkan dengan kelompok budaya lain yang ada di Indonesia. Kesamaan identitas itu ada yang secara fisik maupun dalam hal-hal yang lebih abstrak. Kesamaan identitas secara fisik atau setidaknya identitas yang terungkap dalam wujud-wujud material, entah itu yang disebut fisionomi dari suatu klan/marga/suku maupun dari hasil-hasil yang disebut budaya. Sedangkan kebersamaan dalam hal-hal yang lebih abstrak seperti “pandangan hidup, kepercayaan, cara berpikir, susunan masyarakat, model/tipe kepemimpinan yang dianut dan sebagainya”. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dimensi yang melatarbelakangi pengelompokan “budaya” adalah pertautan manusia dengan dunia yang dialami (Sudiarja, 1995: 7-8).

Sejalan dengan hal tersebut kepentingan kelompok budaya (termasuk kelompok budaya masyarakat Jawa) adalah kelestarian

¹ Staf Pengajar pada Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta.

ciri-ciri yang merupakan identitas diri - dalam kelompok ini “tradisi” yang merupakan khasanah identitas sangat penting. Kesejahteraan kelompok “budaya” diperoleh dalam pengolahan dan penggarapan dunianya.

Kebersamaan dalam hal-hal yang lebih abstrak dalam masyarakat Jawa tersebut apabila diinterpretasi dan direvitalisasi merupakan sumber pengetahuan yang dapat memperkaya wawasan filsafat Nusantara. Kajian terhadap masyarakat Jawa memang sudah dilakukan oleh para ilmuwan (utamanya dalam perspektif ilmu budaya dan sosiologi), tetapi yang secara khusus kajian dalam sudut pandang filsafat sosial masih sangat jarang dilakukan.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji kebersamaan dalam hal-hal yang lebih abstrak dalam masyarakat Jawa, yaitu tentang “Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan” yang dianut dari sudut pandang filsafat sosial. Kajian terhadap hubungan pemahaman kedua hal itu mempunyai relevansi untuk konteks Indonesia. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) argumentasi yang dapat diajukan mengapa tema ini relevan dan penting untuk dikaji. Pertama, dilihat dari aspek teoritikal: (1) setiap masyarakat (bangsa) yang berkebudayaan menunjukkan pandangan hidupnya sendiri-sendiri; (2) sebagaimana dikemukakan oleh Soerjanto Poespowardojo (dalam Alfian, 1985) bahwa cara hidup (meliputi cara berpikir maupun model kepemimpinan yang dianut) menentukan pandangan hidup, begitu juga sebaliknya. Jadi ada interaksi antara dua hal itu. Oleh karena itu dihubungkan dengan tema penelitian ini dapat ditentukan hubungan atau pengaruh yang signifikan antara pandangan hidup masyarakat Jawa dan model kepemimpinan yang dianut.

Kedua, dilihat dari aspek praktis: pengkajian tema kepemimpinan menjadi sangat relevan dikaitkan dengan konteks Indonesia. Pemimpin dan kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peranan dan fungsi yang sangat urgen mengantar pencapaian tujuan bersama yang dicita-citakan. Pemimpin dan kepemimpinan mempunyai sifat universal dan merupakan gejala sosial yang selalu diketemukan dan diperlukan dalam setiap kegiatan atau usaha bersama. Sebagaimana Burby (tanpa tahun: 1-3 dan 114) nyatakan bahwa “hubungan pemimpin - pengikut praktis terdapat di mana saja dan dalam apa saja yang kita lakukan. Hubungan pemimpin - pengikut adalah hal yang wajar bagi manusia seperti wajarnya mereka bernafas”. Secara umum dapat

dikatakan bahwa keberadaan kepemimpinan dalam masyarakat/kehidupan bersama mempunyai fungsi sebagai dinamisor dan penggerak sumber daya. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya sebuah tujuan sangat tergantung pada model kepemimpinan yang diterapkan. Kartini-Kartono (1985) mengatakan keberhasilan suatu kepemimpinan akan dipengaruhi oleh 3 (tiga) determinan, yaitu (1) filsafat sebagai pandangan dunia (pandangan hidup); (2) faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya; (3) kepribadian. Memperhatikan tiga faktor tersebut maka kajian yang menunjukkan pengaruh pandangan hidup terhadap model kepemimpinan akan memiliki makna dan relevansi yang sungguh-sungguh aktual.

Selanjutnya dilihat dari segi historis kajian ini juga akan menjadi menarik dikaitkan dengan model kepemimpinan Jawa yang cukup menghegemoni pada kepemimpinan nasional Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pandangan hidup masyarakat Jawa ?
- 2) Bagaimanakah model kepemimpinan sebagai apresiasi cara hidup dan berpikir dalam masyarakat Jawa ?
- 3) Apakah relevansi pandangan hidup masyarakat Jawa dengan model kepemimpinan yang dianut ?

B. Pengertian Tentang Masyarakat Jawa

1. Beberapa Pandangan tentang Masyarakat

Sebelum mengemukakan pengertian masyarakat Jawa, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pandangan tentang masyarakat sebagai dasar pengertian. Istilah “masyarakat” dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *society*, yang berasal dari bahasa Latin ”*socius*” yang berarti “kawan” (Siswanto, 2009: 25). Pandangan mengenai masyarakat terdapat berbagai pendapat, tergantung pada sudut pandang masing-masing sarjana atau pemikir (ahli sosial-politik, sosiolog, antropolog maupun filosof). Pandangan-pandangan itu antara lain sebagai berikut

Robert M. Maclver dalam **The Web of Government** (1961: 22) mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan (*society means a system of ordered relations*). Masyarakat adalah kumpulan manusia yang mempunyai hubungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Berdasarkan

makna ini kumpulan orang yang mendengarkan ceramah atau rapat , atau berkumpulnya orang yang berkerumun karena ada kecelakaan, misalnya tabrakan antara mobil dan sepeda motor, tidak dapat dimaknai sebagai suatu masyarakat. Alasannya, meskipun mereka berkumpul, sebenarnya mereka tidak mengenal satu sama lain, tidak saling membutuhkan, dan tidak saling berhubungan. Berkumpulnya orang-orang itu disebut kumpulan massa.

Mayor Polak dalam **Sosiologi** (1979) mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai hubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan itu adalah hubungan sosial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis.

Kemudian Soekanto dalam bukunya **Sosiologi Suatu Pengantar** (1977) mengatakan dari sudut tinjauan kebudayaan, bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Koentjaraningrat dalam bukunya **Pengantar Ilmu Antropologi** (1979: 160) menyebutkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama..

Van Paasen dalam bukunya **Filsafat Sosial** menyebutkan, masyarakat adalah persatuan banyak person yang kurang lebih sadar dan aktif bersama-sama terlibat dalam interaksi timbal balik dalam tujuan bersama, yang harus tercapai secara teratur, tertentu dan progresif.

Pandangan-pandangan di atas memperlihatkan dengan jelas apa yang menjadi kesamaan unsur-unsur masyarakat secara hakiki. Koentjaraningrat (1979: 157) menyebut kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur masyarakat, yaitu: berhubungan dengan kategori sosial, golongan sosial, kelompok dan perkumpulan.

Di samping itu, unsur-unsur yang sama dikemukakan dalam pandangan-pandangan di atas adalah: (1) Manusia yang hidup bersama, secara teoritis angka minimum adalah dua orang yang hidup bersama; (2) bercampur untuk waktu yang lama; (3) kesatuan hidup bersama menimbulkan kebudayaan. Untuk itu setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada hakikatnya mencakup semua hubungan dan kelompok di dalam suatu wilayah yang memiliki tujuan yang sama. Hubungan sosial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Oleh karena itu, sosialitas (hubungan antar manusia) dan kenyataan sosial merupakan pembicaraan utama dalam masyarakat.

2. Pengertian Masyarakat Jawa

Pengertian tentang masyarakat Jawa didapatkan tidak terlepas dari pengertian masyarakat sebagaimana disebutkan di atas. Pengertian “Jawa” dimaksudkan dalam “masyarakat Jawa” adalah masyarakat yang hidup dalam kungkungan budaya Jawa. Selanjutnya, untuk menyebut “masyarakat Jawa” tidak lepas dari apa yang disebut “orang Jawa”. “Orang Jawa” inilah yang dengan segala interaksinya, dengan segala adat-istiadatnya, dengan sistem moralnya dan dengan segala aspek budayanya akan membentuk “masyarakat Jawa”. Menurut Magnis-Suseno (1985: 15), yang dimaksud “orang Jawa” adalah:

- 1) Orang yang berbahasa Jawa, yang masih berakar di dalam kebudayaan dan cara berpikir sebagaimana terdapat di daerah pedalaman Jawa, dari sebelah Barat Yogyakarta sampai daerah Kediri ke Timur; dan
- 2) Yang sekaligus tidak secara eksplisit berusaha untuk hidup di atas dasar agama Islam.

Pendapat yang dipakai oleh Magnis-Suseno tersebut adalah batasan sebagaimana sering juga dipakai oleh beberapa antropolog.

Kodiran (1975: 322) lebih lanjut mengatakan, masyarakat Jawa yang hidup dalam daerah kebudayaan Jawa meliputi seluruh bagian Tengah dan Timur dari Pulau Jawa. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Jawa dengan dialek masing-masing daerah yang berbeda. Sebelum terjadi perubahan-perubahan status wilayah seperti sekarang ini, ada daerah-daerah yang secara kolektif sering disebut daerah *kejawen*, yaitu Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang dan Kediri. Daerah di luar itu dinamakan “pesisir” dan “ujung timur”.

Berdasarkan batasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa adalah “kesatuan hidup orang-orang Jawa yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, sistem norma dan

sistem budaya Jawa yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama yaitu orang Jawa”.

3. Susunan Masyarakat Jawa

Aristoteles filsuf Yunani yang terkenal dengan tesis manusia sebagai *zoonpolitikon* atau *homo socius* berpendapat bahwa pada masyarakat terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu mereka yang kaya sekali; mereka yang melarat; dan mereka yang berada di tengah-tengahnya (dalam Soekanto, 1977: 133). Terdapatnya macam-macam keadaan individu dalam masyarakat yang merupakan suatu pelapisan sosial adalah hal yang wajar dan umum serta merupakan ciri yang tetap. Alasan terbentuknya lapisan-lapisan dalam masyarakat itu biasanya berdasarkan tingkat kepandaian, tingkat umur (yang lebih tua/senior), sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan kemungkinan juga harta dalam batas-batas tertentu. Pada tiap-tiap masyarakat alasan yang dipakai untuk menentukan lapisan-lapisan sosial itu biasanya berbeda. Hal ini juga berlaku di Indonesia.

Fakta sejarah sebagaimana dikemukakan oleh Karimah (1983: 53-54), kita (Indonesia) menerima warisan masyarakat yang terbagi dalam tiga golongan dari jaman Hindia Belanda dahulu. Pada jaman Hindia Belanda, adanya penggolongan itu terasa sekali. Ketiga golongan masyarakat itu adalah:

- 1) Golongan Eropa, yaitu orang-orang Eropa yang berada atau tinggal di Indonesia.
- 2) Golongan Timur Asing; golongan ini masih terbagi antara:
 - a. Golongan Timur Asing keturunan Cina
 - b. Golongan Timur Asing bukan keturunan Cina
- 3) Golongan Bumiputera, yaitu penduduk asli Indonesia (sekarang biasa disebut golongan pribumi).

Setelah Indonesia memproklamkan diri sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tidak ada lagi penggolongan seperti pada jaman Hindia Belanda sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini dapat dilihat tidak ada lagi perbedaan kedudukan dari tiap-tiap golongan. Yang ada sekarang adalah penegasan bahwa hanyalah warga negara Indonesia yang berhak dan berkewajiban yang sama sebagai warga negara, baik itu keturunan Eropa, Cina atau keturunan lainnya. Artinya, semua warga negara mendapat kedudukan yang sama baik dalam lapangan hukum, pemerintahan dan lain-lainnya. Penegasan ini sebagaimana

dieksplicitkan dalam hukum dasar tertulis kita (UUD 1945 termasuk UUD 1945 hasil amandemen) pasal 27 & 28. Akan tetapi kenyataannya dalam masyarakat adanya perbedaan-perbedaan dan penggolongan-penggolongan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya masih tetap dirasakan, terutama dalam masyarakat Jawa (Kodiran, 1975: 337).

Dalam masyarakat Jawa ada 3 (tiga) golongan sebagaimana dikemukakan oleh Karimah (1983: 55-56):

- 1) *Bendara*, merupakan bagian masyarakat Jawa yang terdiri dari keluarga kraton dan keturunan bangsawan.
- 2) *Priyayi*, merupakan bagian masyarakat Jawa yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar.
- 3) *Wong cilik*, merupakan bagian dari masyarakat Jawa yang terdiri atas petani-petani, tukang-tukang dan pekerja kasar lainnya.

Bendara dan *priyayi* termasuk pelapisan atas, sedangkan *wong cilik* termasuk pelapisan bawah. Dalam golongan *wong cilik* sendiri masih ada pembagian lagi secara berlapis, yaitu:

- 1) *Wong baku*, yaitu keturunan orang-orang yang terdahulu pertamanya datang menetap di desa. Ini merupakan lapisan yang paling atas;
- 2) *Kuli gondok* atau *lindung*, yaitu terdiri dari orang-orang lelaki yang telah kawin, tetapi tidak mempunyai tempat tinggal sendiri, ia terpaksa menetap di rumah kediaman mertuanya. Ini merupakan lapisan tengah ;
- 3) *Joko, sinoman* atau bujangan, yaitu mereka yang belum menikah dan masih tinggal bersama-sama dengan orangtuanya sendiri atau *ngenger* di rumah orang lain. Ini merupakan lapisan terbawah.

Keberadaan lapisan atau penggolongan-penggolongan di atas menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang berbeda dari keluarga atau anggota keluarga tiap-tiap ketiga lapisan itu.

C. Pandangan Hidup Masyarakat Jawa

Pandangan hidup merupakan suatu abstraksi dari pengalaman hidup; pandangan itu dibentuk oleh suatu cara berpikir dan cara merasakan tentang nilai-nilai, organisasi sosial, kelakuan, peristiwa-peristiwa dan segi-segi lain daripada pengalaman; pandangan hidup adalah sebuah pengaturan mental dari pengalaman itu dan pada gilirannya mengembangkan suatu sikap terhadap hidup (Mulder, 1973: 35). Dengan kata lain, pandangan hidup adalah

wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Yang dimaksud nilai luhur adalah tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia.

Dipandang dari sudut sosiologi atau psikologi pandangan hidup memiliki fungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi, menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, dan menata hubungan antar manusia dengan alam sekitar. Pandangan hidup ini dapat dianalisa sebagai sebuah logika yang menghayati suatu masyarakat. Untuk mengerti bagaimana pandangan hidup masyarakat Jawa maka sebagai titik tolak akan dikemukakan tentang kepribadian masyarakat Jawa, dasar moral masyarakat Jawa, dan cara berpikir masyarakat Jawa.

1. Kepribadian Masyarakat Jawa

Pengertian kepribadian atau sering disebut *personality* adalah semua tingkah laku atau tindak perbuatan dari tiap-tiap manusia sebagai individu yang berbeda dengan individu lainnya yang disebabkan oleh pengaruh susunan unsur-unsur akal dan jiwanya (Koentjaraningrat, 1979: 116). Unsur-unsur yang membentuk kepribadian itu adalah pengetahuan, perasaan dan dorongan naluri yang meliputi dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan seks, dorongan untuk mencari makan, dorongan untuk bergaul dan berinteraksi dengan semua dan sesama manusia, dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya, dorongan untuk berbakti, dan dorongan akan keindahan.

Selanjutnya, jika kita menyebut unsur-unsur kepribadian, di dalamnya ada semacam “kepribadian dasar”. Yang dimaksud kepribadian dasar adalah semua unsur kepribadian yang dimiliki bersama oleh suatu bagian besar dari warga suatu masyarakat. Kepribadian dasar ini ada karena semua manusia sebagai individu dalam masyarakat mengalami pengaruh lingkungan kebudayaan yang sama selama masa tumbuhnya. Hal ini juga berlaku bagi keberadaan kepribadian masyarakat Jawa, paling tidak ada individu-individu dalam masyarakat Jawa yang tingkah laku dan perbuatannya saling pengaruh mempengaruhi, sehingga ada semacam kecenderungan adanya sikap atau pola kelakuan yang meniru. Alhasil antara kepribadian masyarakat Jawa dengan kepribadian masyarakat lainnya ada perbedaan. Namun karena masyarakat Jawa dengan masyarakat lain di Indonesia tetap dalam

satu keterikatan negara Indonesia, maka ada kecenderungan pengaruh-mempengaruhi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Secara lebih populer, kepribadian masyarakat Jawa adalah ciri-ciri watak masyarakat Jawa yang konsisten, yang memberikan kepada masyarakat Jawa suatu identitas sebagai masyarakat yang khusus.

Kepribadian masyarakat Jawa dikategorikan sebagai “kepribadian Timur” yang mementingkan kehidupan kerohaniah. Hal ini berbeda dengan “kepribadian Barat” yang lebih mementingkan kehidupan kejasmaniahnya.

2. Dasar Moral Masyarakat Jawa

Dasar moral masyarakat Jawa sebagaimana dikemukakan oleh Niels Mulder (1973: 43-44) terletak di dalam ketentraman dan keselarasan (*rust en orde*). Dasar moral ini terletak dalam hubungan yang selaras antara orang di dalam masyarakat mereka sendiri. Hubungan yang selaras ini akan tercapai dan terwujud manakala masing-masing individu sebagai anggota masyarakat menempatkan hak dan kewajibannya secara terpadu.

Niels Mulder lebih lanjut mengatakan, cita-cita masyarakat Jawa terletak dalam tata-tertib masyarakat yang selaras, melihat orang sebagai individu tidak sangat penting, mereka bersama-sama mewujudkan masyarakat. Terciptanya keselarasan masyarakat akan menjamin kehidupan yang baik bagi individu-individu. Tugas moral seseorang dalam masyarakat Jawa adalah menjaga keselarasan masyarakat dengan menjalankan kewajiban-kewajiban sosial. Kewajiban sosial itu menyangkut hubungan sosial, yaitu hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hubungan-hubungan sosial itu tak sama, melainkan hirarkis. Dengan kata lain, adanya bermacam-macam predikat dan pangkat dari seseorang menyebabkan hubungan sosial dalam masyarakat pun berlainan, dalam arti ada tingkatannya. Implikasinya kewajiban sosial itu pun bertingkat. Misalnya dalam golongan masyarakat di Jawa, yaitu antara seorang *bendara*, *priyayi* dan *wong cilik* akan berlainan di dalam kewajiban moralnya. Karena itu seseorang harus senantiasa menjaga keselarasan hubungan sosial dalam masyarakat dengan menempatkan dirinya sesuai dengan status dan fungsinya masing-masing. Misalnya, orang yang dalam lapisan atas harus memelihara hubungan dengan bawahannya dan bertanggung jawab terhadapnya; mereka yang berada dalam lapisan bawah harus mentaati dan

menghormati atasannya; orang yang mempunyai status sosial yang sama atau setaraf dan setingkat harus bertindak dan berbuat sama, harus solider. Semua pangkat atau penggolongan dalam masyarakat itu terikat dan mewujudkan suatu susunan atas dasar kekeluargaan, yaitu orang harus bergotong-royong, tolong-menolong dan tukar-menukar. Dasar moral masyarakat Jawa terletak dalam hubungan dan kewajiban antara orang yang tidak sama rata.

3. Cara Berpikir Masyarakat Jawa

Dalam mengungkapkan cara berpikir masyarakat Jawa ini berdasarkan hasil penelitian Niels Mulder yang sudah dibukukan dengan judul **Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional**.

Berpikir adalah suatu perbuatan mental yang menertibkan gejala-gejala dan pengalaman-pengalaman, supaya gejala dan pengalaman tersebut menjadi jelas, dapat dimengerti dan diinterpretasikan. Susunan dari pandangan hidup masyarakat Jawa merupakan suatu hasil dari cara berpikir dan cara interpretasi tentang pengalaman sosial dan kultural; pada gilirannya pandangan hidup itu merupakan suatu pedoman bagi pelaksanaan dan perbuatan di kemudian hari. Dengan perkataan lain, pengalaman hidup dan pandangan hidup dihubungkan oleh pikiran dan cara berpikir dan interpretasi itu menentukan susunan pandangan hidup. Pandangan hidup itu menjadi logika dari pengalaman, penafsiran dan pengharapan, menjadi logika dari proses sosial bagi mereka yang ikut serta dalam proses itu. Cara berpikir dan pandangan hidup menentukan persepsi sosial (Mulder, 1973: 58).

Berpikir dari masyarakat Jawa tidak terlepas dari pelaksanaan kehidupannya sehari-hari. Kehidupan Jawa bersifat serimonial. Sifat serimonial ini terlihat pada pandangan hidup orang Jawa yang selalu meresmikan segala sesuatu dengan upacara. Segala sesuatu harus diformalkan, serba sah dan nyata, entah isinya sudah ada atau belum. Misalnya: orang mengadakan suatu upacara perkawinan dilaksanakan dengan secara mewah dan megah, tanpa memikirkan apa yang akan dilakukan setelah upacara perkawinan itu. Demikian juga mereka yang datang tidak lagi memikirkan siapa yang menikah pada upacara perkawinan itu, apakah mereka berbahagia atau tidak, yang penting mereka mengikuti upacara tersebut (Mulder, 1973: 59).

Selanjutnya, Niels Mulder (1973: 60-62) menarik kesimpulan dari cara berpikir orang Jawa tersebut di atas, sebagai berikut:

- 1) Bentuk lebih penting daripada isi; bentuk menentukan isi; bentuk menguasai kenyataan. Isi termasuk bentuk, dan keduanya tidak dapat dipisahkan; isi adalah rumusnya; sampai Bentuk = Isinya. Bentuk yang harus diisi sudah ada, seperti syariat agama, Pancasila, kemerdekaan, Pemilu, Repelita atau rumus dan formula lain. Rumus-rumus tersebut sudah pasti, baik dan sempurna. Bangsa belum sempurna, belum adil makmur dan seterusnya, masih terbelakang; masyarakat terus menerus mencari hal ini. Akan tetapi bentuk “ke-Ratu-Adilan” sudah ada sejak jaman dahulu kala. Sekarang masyarakatlah yang harus mengisinya.
- 2) Bentuk yang sempurna sudah ada; bentuk ini harus ditaati dan diisi. Untuk mengisi bentuk yang sempurna ini orang harus menunggu ‘waktu baik’. Orang Jawa menyesuaikan diri dengan waktu, dengan jaman. Mereka tidak menguasai waktu sebagai alat yang seharusnya untuk membentuk situasi yang diinginkan. Masyarakat Jawa hanya menanti dan sedang menanti kenyataan yang sempurna. Mereka selalu menunggu.
- 3) Berdasarkan kedua kesimpulan di atas, membawa kepada kesimpulan ketiga, yaitu: waktu tidak memainkan peranan yang penting. Sebagai variabel yang berdiri sendiri waktu tidak dipahami. Bentuk adalah buah pikiran yang paling penting dan sudah meliputi waktu. Waktu dan isi tidak didiferensiasikan dari bentuk.

4. Pernyataan Pandangan Hidup Masyarakat Jawa

Masyarakat Jawa merupakan salah satu komunitas masyarakat yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan komunitas masyarakat yang lain, antara lain: masyarakat Batak, masyarakat Bugis, masyarakat Toraja, masyarakat Minang, masyarakat Bali, dan sebagainya. NKRI yang terdiri dari berbagai komunitas masyarakat dalam kehidupan memiliki “Pancasila” yang sudah diakui dan diterima kebenarannya, kemanfaatannya oleh seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia sebagai pandangan hidup dan pedoman hidup dalam semua aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat maupun hidup pribadi. Artinya, semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap

manusia Indonesia harus didasari dan dijiwai semua nilai sila Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisah-pisahkan antara sila yang satu dengan sila lainnya; keseluruhan sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis. Antara sila yang satu dengan sila yang lain saling mengisi.

Masyarakat Jawa merupakan bagian terbesar dari masyarakat-bangsa Indonesia tentu juga memiliki pandangan hidup yang merupakan landasan bagi berlakunya sistem kehidupan di Jawa. Keberadaan pandangan hidup masyarakat Jawa itu tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat-bangsa Indonesia, karena Pancasila digali dari adat-istiadat, agama dan kepercayaan serta kebudayaan tiap-tiap daerah di Indonesia. Dalam hal ini Jawa turut andil dalam pembentukan pandangan hidup bangsa Indonesia tersebut. Dengan perkataan lain, pandangan hidup masyarakat Jawa tidak bertentangan dengan Pancasila, melainkan merupakan perwujudan dan pelaksanaan Pancasila di daerah (sejalan dengan prinsip “disting-dalam identitas atau identik-dalam distingtif”; “otonomi-dalam korelasi atau korelasi-dalam otonomi”).

Selanjutnya berdasarkan kepribadian masyarakat Jawa, dasar moral masyarakat Jawa, cara berpikir masyarakat Jawa sebagaimana diungkapkan di atas, berikut ini akan dikemukakan pandangan hidup masyarakat Jawa. Sebagaimana diungkapkan oleh Niels Mulder (1973: 14), bahwa pandangan hidup masyarakat Jawa (orang Jawa) diungkapkan sebagaimana yang tercermin dalam praktek dan keyakinan agama, yaitu “Javanisme”. Javanisme adalah pandangan hidup orang Jawa dan juga agamanya, yang menekankan ketentrangan batin, keselarasan dan keseimbangan, sikap *narima* terhadap segala peristiwa yang terjadi sambil menempatkan individu di bawah masyarakat dan masyarakat di bawah semesta alam. Pandangan hidup orang Jawa ini mengajarkan agar masyarakat Jawa menempatkan adanya hubungan yang selaras antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan individu lainnya, antara individu dengan alam semesta dan antara individu dengan Tuhannya. Adanya keselarasan tersebut masyarakat Jawa diharapkan dapat menjalankan hidupnya dengan benar. Agar perwujudan keselarasan dapat terjamin maka masing-masing individu harus menerapkan kaidah-kaidah moral yang menekankan pada sikap “*narima*, sabar, *waspada-eling* (mawas diri), *andap asor* (rendah

hati) dan *prasaja* (sahaja) “; Hal-hal itulah yang mengatur dorongan-dorongan dan emosi-emosi pribadi. Sedangkan yang berhubungan untuk mengatur keselarasan kehidupan dalam masyarakat di dunia ini sudah dipetakan dan tertulis dalam bermacam-macam peraturan, seperti: kaidah-kaidah etiket Jawa (tatakrama) yang mengatur kelakuan antar-manusia, kaidah-kaidah adat yang mengatur keselarasan dalam masyarakat, peraturan beribadat yang mengatur hubungan formal dengan Tuhan.

Niels Mulder lebih lanjut mengatakan, bahwa kebatinan seringkali dianggap sebagai inti-pati Javanisme; gaya hidup orang-orang Jawa ialah kebatinan: gaya hidup manusia yang memupuk “batinnya”. Kebatinan sebagai pernyataan pandangan hidup orang Jawa; kebatinan sebagai gaya atau sikap hidup orang-orang Jawa merupakan salah satu perceminan atau pernyataan pandangan hidup. Dalam hal ini berbeda dengan S. de Jong. Menurut S. de Jong (1976: 9), bahwa sikap hidup itu tidak identik dengan pandangan hidup. Orang-orang yang mempunyai pandangan hidup yang berbeda terhadap masalah Tuhan, dunia dan manusia, kemungkinan dalam praktek kehidupannya dapat memperlihatkan sikap hidup yang sama. Hal ini terlihat pada masyarakat Jawa, yang masing-masing individu memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda, tetapi hampir secara keseluruhan memiliki sikap hidup yang hampir sama dalam masalah mistik dan kebatinan.

Masyarakat Jawa sebagian besar secara lahiriah mengaku sebagai kaum santri, tetapi kenyataannya mereka masih saja dalam lubuk hatinya menganggap mistik dan kebatinan sebagai bagian dari hidupnya. Menurut Niels Mulder sekurang-kurangnya 80 % orang-orang Jawa terlibat dalam masalah mistik (Mulder, 1973: 15). Sehubungan dengan masalah mistik dan kebatinan, pada sebagian masyarakat Jawa masih berlaku suatu kebiasaan-kebiasaan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan perhitungan magis (*petungan* dalam bahasa Jawa) dengan mencari keterangan-keterangan dari primbon-primbon apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus ditinggalkan/dipantang, agar rencana-rencana dan kegiatan mereka bertepatan dengan saat dan keadaan yang baik.
- 2) Melakukan *laku*: bersemadi dan bertapa, agar apa yang diharapkan dapat terkabul.

- 3) Mengadakan upacara-upacara persembahan tertentu, maksudnya untuk meminta keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka, antara lain:
 - a. Membuang *sesajen* ke laut, baik di laut Selatan dengan mitos Nyi Rara Kidul, atau laut Utara dengan mitos Dewi Lanjarnya.
 - b. Membakar kemenyan pada hari-hari tertentu di tempat-tempat tertentu pula.
 - c. Mengadakan upacara selamat pada hari kelahiran, perkawinan atau kematian.
 - d. Menanam kepala kerbau, kambing atau babi untuk mendapat keselamatan dalam membangun gedung jembatan bendungan, jalan, rumah.
 - e. dan sebagainya.
- 4) Melakukan ziarah-ziarah ke tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat dan bersejarah untuk meminta sesuatu berkah. Sebelum melakukan ziarah biasanya didahului dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti: puasa, sesirik, mutih, dan lain sebagainya.

Demikianlah pandangan hidup masyarakat Jawa dalam praktek hidup sehari-hari. Akan tetapi kebiasaan-kebiasaan sebagaimana dicontohkan di atas, seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya masih berlaku pada sebagian kecil masyarakat Jawa, sedangkan sebagian yang lain tengah berusaha mencari bentuk nyata dari praktek kebatinan tersebut. Perubahan terjadi pada sebagian masyarakat Jawa dalam masalah kebatinan itu disebabkan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan semakin majunya teknologi. Walaupun terjadi perubahan dalam masyarakat Jawa, praktek kebatinan dalam kehidupan masyarakat Jawa tidak dapat dipungkiri dan ditolak masih tetap berlaku sampai sekarang. Setidaknya usaha sebagian masyarakat Jawa yang lain adalah dengan mengalihkan tujuan dari sebagian kebiasaan-kebiasaan yang berlaku tersebut di atas. Misalnya dalam hal perhitungan magis (*petungan*) sudah beralih pada tingkat penguasaan pengetahuan mereka. Sedang untuk masalah selamat hari kelahiran, perkawinan maupun kematian semata-mata akhirnya bertujuan untuk menambah semangat kekeluargaan, sehingga pada saat-saat tertentu antara mereka dapat mengadakan komunikasi secara tatap muka. Lebih dari itu mereka

sekedar mensyukuri tentang apa yang diperoleh selama ini. Dengan apa yang diharapkan dari pandangan hidup masyarakat Jawa ini justru dapat ikut serta mempercepat proses pembangunan nasional.

D. Kepemimpinan Jawa

1. Model Kepemimpinan Jawa

Berdasarkan pandangan hidup, cara berpikir, dasar moral masyarakat Jawa dan sistem pendidikan keluarga pada masyarakat Jawa di atas menyebabkan seseorang memerlukan bimbingan dan pertolongan dalam memecahkan masalah. Hal ini berpengaruh dalam sistem kepemimpinan di Jawa. Mereka lebih senang dengan pendapat pemimpin mereka, orang-rang Jawa ingin selalu dilindungi oleh pemimpin atau oleh bapak-bapak mereka. Mereka hormat dan taat kepada pemimpin bukan sebagai suatu keterpaksaan, seakan-akan pemimpin mereka mempunyai kharisma tertentu yang besar. Cita-cita dan ideologi yang abstrak tidak mempunyai nilai motivasi yang tinggi, melainkan orang dan pangkat mereka memotipkan, mereka memberi motivasi. Kepercayaan kepada orang dan pangkat lebih penting daripada minat terhadap cita-cita mereka atau terhadap prestasi-prestasi objektif.

Berdasar kenyataan di atas, memperlihatkan bahwa pemimpin mereka mempunyai arti moral. Orang dengan mudah melupakan suara batin dan kesadaran pribadi. Dengan rela hati orang mengikuti bapak-bapak atau pemimpin besar mereka. Gejala ini merupakan konsekuensi dari moral yang hirarkis, yang didukung dengan kuat adanya sistem pendidikan keluarga yang menyebabkan orang tidak dapat berdiri sendiri. Orang Jawa senang dipimpin dan biasa menyesuaikan diri dengan Sang masyarakat; dengan demikian *ngeli* dan *nrimo* menjadi sikap moral yang agung (Mulder, 1973: 49-50).

Selanjutnya, moralitas masyarakat Jawa yang sangat mempengaruhi terhadap pandangan yang berhubungan dengan keberadaan kepemimpinan, antara lain tercermin di dalam ungkapan-ungkapan atau pepatah-pepatah sebagai berikut:

- 1) *Sepi ing pamrih rame ing gawe, amemayu ayuning buwana*, yang artinya masyarakat Jawa ingin bekerja keras tanpa mencari keuntungan untuk diri sendiri, manusia berusaha untuk memajukan dan mengindahkan dunia.

- 2) *Mangan ora mangan waton kumpul*, yang artinya makan tidak makan asalkan berkumpul dengan keluarganya. Masyarakat Jawa selalu menghendaki tetap bersatunya dan tetap utuhnya seluruh keluarga, bahkan seluruh masyarakat.
- 3) *Ana dina ana upa*, artinya setiap hari atau ada hari pasti ada nasi. Masyarakat Jawa dalam ungkapan ini selalu berserah pada Dzat Yang Maha Tinggi ataupun pada sesamanya, bahwa mereka percaya tidak akan kekurangan makan. Demikian juga hal ini berlaku bahwa setiap anak yang lahir itu membawa rejeki sendiri-sendiri.

Ungkapan-ungkapan atau pepatah-pepatah Jawa yang mengandung nilai moral yang tinggi sebenarnya masih banyak lagi. Terdapat kesesuaian pula dengan dasar moral masyarakat Jawa yang antara lain terletak pada keselarasan hidup bermasyarakat, hal ini terlihat dalam ungkapan-ungkapan atau pepatah-pepatah Jawa tersebut. Masyarakat Jawa ingin bekerja keras tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, namun juga mengusahakan demi kepentingan orang lain, bahkan untuk kepentingan dunia. Kenyataan ini yang kemudian memunculkan konsep masyarakat Jawa *alon-alon waton kelakon*, artinya biarpun lambat bekerjanya asalkan tercapai yang diharapkan. Hal ini merupakan implikasi dari pemikiran bahwa mereka bekerja dan apabila berhasil dengan lambat atau cepat, hasilnya akan dirasakan bersama-sama oleh anggota masyarakat lainnya.

Di samping itu, masyarakat Jawa juga masih menjunjung tinggi kekerabatan dan kekeluargaan. Apa yang mereka peroleh agar dapat juga dirasakan dan dinikmati bersama-sama oleh seluruh anggota keluarganya. Apapun yang terjadi mereka ingin tetap bersatu dan berkumpul sebagai dasar kesatuan bagi mereka.

Bertitik tolak dari moralitas masyarakat Jawa tersebut, yang diinginkan oleh masyarakat Jawa adalah adanya manusia yang ideal yang selalu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *riila*: (ridho = rela), yaitu bersedia menyerahkan segala miliknya apabila diperlukan; *narimo* (*nrimo* = menerima), yaitu menerima dengan segala keriang dan kesenangan hati tentang apapun yang menimpa dirinya; sabar, yaitu hidup dengan sabar dan penuh toleransi.

2. Beberapa Ajaran *Sesepuh* Jawa tentang Kepemimpinan

Pada bagian ini hanya dikemukakan beberapa ajaran para *sesepuh* Jawa tentang kepemimpinan yang dianggap representatif, antara lain:

- 1) Mangkunegoro I. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang diajarkan dikenal dengan nama *Tri Dharma*. *Tri Dharma* sering dikomandokan mantan Presiden Kedua NKRI Soeharto dalam memupuk etos kerja dan kebaktian kepada nusa bangsa. Isi *Tri Dharma* Mangkunegoro I sebagai berikut:
 - a. *Mulat salira hangrasa wani*, artinya melihat dan mengenal dirinya sendiri, bersikap mawas diri/introspeksi, percaya diri, penuh rasa kesadaran diri, sampai terbentuk pribadi dewasa yang berjati diri.
 - b. *Rumangsa melu handarbeni*, artinya merasa ikut memiliki negara dan tanah air yang tercinta sebagai hasil perjuangan Pangeran Sambernyawa (Mangkunegoro I) bersama rakyat pupuk persatuan dan kesatuan.
 - c. *Wajib melu hangrungkebi*, artinya setiap warga negara wajib berkorban dari kesadaran pribadi dan rasa tanggung jawabnya terhadap tanah air, rela berkorban demi tanah air (Eko, 1989: 137).
- 2) Falsafah Jawa oleh Mangkunegoro IV, dalam **Wulangreh**, **Wedatama** dan **Serat Centini**. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat baik dan utama ialah: *Heneng; hening; heling; waspada/hawas; aja mung rumangsa bisa, nanging sing bisa rumangsa*.
- 3) Ajaran Falsafah Jawa dalam **Wulangreh** oleh S. Pakubuwono IV. Ajaran ini menunjukkan sifat-sifat yang buruk yang harus dihindari bila ingin menjadi pemimpin, juga setelah menjadi pemimpin agar mendapat dukungan dari masyarakat, yaitu: *Aja adigang, adigung, adiguna; aja lonyo; aja lemer; aja genja; aja abuntut; aja nyumur; aja drengki; aja meren; aja dakwen; aja maoni; aja ma lima (main, madad, maling, minum, madon)*.
- 4) Ki Hajar Dewantara. Ia mengajarkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu:
 - a. *Tetep, teteg, antep lan mantep*.
 - b. *Ngandel, kendel, kandel lan bandel*.
 - c. *Ning, neng, nung lan nang*.
 - d. *Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*.

- 5) Ajaran Soeharto (Presiden RI Kedua). Ia mengajarkan ciri-ciri kepemimpinan sebagaimana ditulis dalam buku **Butir-butir Budaya Jawa** (1990), sebagai berikut:
- a) *Aja kagetan, aja gumunan lan aja dumeh.*
 - b) *Sura dira jayaningrat lebur dening pangestuti.*
 - c) Ilmu *katon*, dengan tekad mempelajari semua tugas dengan sungguh-sungguh.
 - d) *Mikul dhuwur mendhem jero.*
 - e) Dalam mengambil keputusan menggunakan ilmu, cipta, rasa dan karsa.
 - f) Ingat sumbermu bila tidak ingin kekeringan air.
 - g) Delapan butir yang digambarkan dalam Arjuna Wijaya (cinta tanah air, patriotisme, pantang menyerah, semangat kepahlawanan, tanpa pamrih, semangat percaya diri, semangat setia kepada Pancasila dan UUD 1945).
 - h) Beribadah selamanya tiada mengenal akhir, belajar selamanya tiada mengenal akhir, dan bekerja berbakti kepada negara dan bangsa selamanya tiada mengenal akhir.
 - i) Rasa percaya diri yang besar, untuk mencapai tujuan bersama yang menggairahkan. Rasa percaya diri akan membangkitkan kreativitas.
 - j) Meskipun banyak tantangan yang menghadang, jangan berputus asa, sinis dan pesimis.
 - k) Setiap keberhasilan kita, jangan sampai kita lupa diri, takabur dan menghambur-hamburkan dana dan daya dengan melupakan prioritas-prioritas yang sangat mendesak. Namun kita wajib bersyukur atas karuniaNya.
 - l) *Tri Dharma* ajaran Pangeran Mangkunegoro I selalu menjadi landasan kebijaksanaannya.
 - m) *Tepa selira.*
 - n) Sifat royal itu tidak baik, juga *diugung* dan *diujar*.
 - o) Bangsa yang melupakan warisan budayanya akan kehilangan kepribadiannya. Bangsa yang kehilangan kepribadiannya akan menjadi lemah. Dan bangsa yang lemah akhirnya akan runtuh.
 - p) Dalam hal pendidikan generasi penerus menekankan: hasil pendidikan kita harus menghasilkan perpaduan yang utuh, antara kecerdasan pikiran, keluhuran budi pekerti, semangat kebangsaan serta menjadikan manusia yang berwatak Pancasila.

E. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan hidup masyarakat Jawa (orang Jawa) sebagaimana tercermin dalam praktek dan keyakinan agama, Javanisme, menekankan ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan, sikap *narima* terhadap segala peristiwa yang terjadi sambil menempatkan individu di bawah masyarakat dan masyarakat di bawah semesta alam. Pandangan hidup orang Jawa mengajarkan agar masyarakat Jawa menempatkan adanya hubungan yang selaras antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan individu lainnya, antara individu dengan alam semesta dan antara individu dengan Tuhannya. Dengan adanya keselarasan masyarakat Jawa diharapkan dapat menjalankan hidup dengan benar. Agar perwujudan keselarasan terjamin, masing-masing individu harus menerapkan kaidah-kaidah moral yang menekankan pada sikap *narima*, sabar, *waspada-eling* (mawas diri), *andap asor* (rendah hati) dan *prasaja* (bersahaja).

Terkait dengan kepemimpinan, model kepemimpinan Jawa adalah "bapakisme" dan karismatik. Masyarakat Jawa menggambarkan bahwa seseorang senantiasa memerlukan bimbingan dan pertolongan dalam memecahkan masalah. Mereka lebih senang dengan pendapat pemimpin mereka. Orang-orang Jawa ingin selalu dilindungi oleh pemimpin atau oleh bapak-bapak mereka. Mereka hormat dan taat kepada pemimpin bukan sebagai suatu keterpaksaan, seakan-akan pemimpin mereka mempunyai karisma tertentu yang besar. Kepercayaan kepada orang dan pangkat lebih penting daripada minat terhadap cita-cita mereka atau terhadap prestasi-prestasi objektif.

Kemudian relevansi pandangan hidup masyarakat Jawa dengan model kepemimpinan yang diterapkan tercermin pada kaidah-kaidah moral yang menekankan sikap *narima*, sabar, *waspada-eling* (mawas diri), *andap asor* (rendah hati) dan *prasaja* (bersahaja) yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam mewujudkan keselarasan masyarakat. Hal ini sejalan dengan rasa hormat dan taat orang-orang Jawa terhadap pemimpin yang dipercaya bukan sebagai keterpaksaan.

F. Daftar Pustaka

- Burby, Raymond J., tanpa tahun, **Prinsip-prinsip Pokok Leadership (Kepemimpinan)**, Liberty, Yogyakarta.
- De Jong, S., 1976, **Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa**, Kanisius, Yogyakarta.
- Eko, Marsudi, 1989, **Kepemimpinan Pancasila Suatu Eksplorasi**, Pilar Daya Ratma, Solo.
- Karimah, K. E., 1983, **Hakekat dan Hubungan Sifat Individu dan Sosial Masyarakat Jawa Ditinjau Menurut Etika Pancasila**, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 1985, **Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?**, Rajawali, Jakarta.
- Kodiran, 1975, "Kebudayaan Jawa" dalam Koentjaraningrat, **Manusia dan Kebudayaan di Indonesia**, Djambatan, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1979, **Pengantar Ilmu Antropologi**, Aksara Baru, Jakarta.
- Maclver, Robert M., 1961, **The Web of Government**, The Mac-Millan Company, New York.
- Mayor Polak, J.B.A.F., 1979, **Sosiologi**, Penerbit Ichtiar Baru,-Van-Hoeve, Jakarta.
- Mulder, Niels, 1973, **Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Paasen, C. v., Tanpa tahun, **Filsafat Sosial**, Kumpulan Kuliah, Fakultas Filsafat, Yogyakarta.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1985, "Alam Pemikiran dan Kebudayaan" dalam Alfian (ed.), **Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan**, Gramedia, Jakarta.
- Rukmana, Hardiyanti (Penyunting), 1990, **Butir-butir Budaya Jawa**, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, Jakarta.
- Siswanto, Dwi, 2009, **Orientasi Pemikiran Filsafat Sosial**, Penerbit Lima, Yogyakarta.
- Soekanto, 1977, **Sosiologi: Suatu Pengantar**, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Sudiarja, 1995, **Filsafat Sosial**, Pascasarjana S2 Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suseno, F. Magnis, 1985, **Etika Jawa (Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijakan Hidup Jawa)**, Gramedia, Jakarta.